Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 26067-26073

Ambisi Nol Kemiskinan Ekstrem 2026: Kritik Terhadap Formulasi Kebijakan dalam Kerangka SDGs 1

Nindya Rachma Paramitha Adi[1], Lulus Gadis Sulaksana[2], Indah Prabawati[3], Firre An Suprapto[4]
[1,2,3,4]Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya
Corresponding Author: Nindya Rachma Paramitha Adi, E-Mail: 25040674337@mhs.unesa.ac.id

Published, Mei 2026

ABSTRACT
Extreme poverty is one of the key issues in the global development agenda, as reflected in the Sustainable Development Goals (SDG 1: No Poverty). The Government of Indonesia has set a target to achieve zero extreme poverty by 2026 as a form of commitment to accelerating poverty reduction. However, this target is considered highly challenging due to the complexity of poverty issues and limitations in policy formulation. This study aims to analyze and evaluate the formulation of the "Zero Extreme Poverty 2026" policy using the Multiple Streams framework and public policy theory. The method employed is a qualitative approach through document analysis and literature review, referring to various sources such as reports from the Central Bureau of Statistics (BPS), the World Bank (2020), and UNDP (2019). The results show several weaknesses in the policy formulation. In the problem stream, the identification of issues remains singular and does not yet reflect a multidimensional approach as emphasized in SDG 1. In the policy stream, although various policy instruments exist, weaknesses are found in program integration, intersectoral coordination, and local capacity readiness. In the politics stream, the participation of non-government stakeholders is still limited, resulting in suboptimal legitimacy and policy ownership. Furthermore, there is a significant gap between policy targets and field realities, particularly in terms of problem definition, implementation capacity, and coordination frameworks. With a relatively short timeframe, achieving zero extreme poverty by 2026 may be difficult without improvements in policy formulation. Therefore, this study recommends reformulating the policy using a multidimensional approach, strengthening cross-sector coordination, increasing stakeholder participation, and adjusting the timeline to be more realistic and aligned with existing conditions.

Kata Kunci: *kebijakan publik; kemiskinan ekstrem; SDG 1; formulasi kebijakan; multiple streams*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem merupakan salah satu permasalahan pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi fokus utama agenda global melalui Sustainable Development Goals (SDGs). Target pertama dalam SDG adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun (SDG 1: No Poverty). Agenda ini tidak hanya menjadi komitmen global, tetapi juga menjadi acuan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.

Namun, dalam konteks nasional, pemerintah Indonesia telah merumuskan ambisi yang lebih spesifik, yaitu mencapai *"Nol Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2026"* sebuah target yang sangat ambisius mengingat tantangan struktural dan multidimensional yang dihadapi. Target ini bahkan lebih cepat dibandingkan dengan target global SDGs yang ditetapkan pada tahun 2030, sehingga menuntut adanya percepatan kebijakan yang signifikan dan terukur.

Secara empiris, kondisi kemiskinan di Indonesia masih menunjukkan dinamika yang kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional masih berada pada kisaran satu digit, namun kelompok masyarakat dalam kategori kemiskinan ekstrem tetap menjadi perhatian utama karena memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Selain itu, dampak pandemi COVID-19, inflasi, serta ketimpangan ekonomi antar wilayah turut memperlambat upaya penurunan kemiskinan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya.

Dengan demikian, pendekatan kebijakan yang hanya berfokus pada aspek pendapatan menjadi tidak cukup. Diperlukan pendekatan multidimensional yang mampu menangkap kompleksitas permasalahan kemiskinan secara lebih komprehensif. Dalam hal ini, formulasi kebijakan menjadi tahap yang sangat krusial karena menentukan arah dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Meskipun kebijakan ini muncul dari komitmen internasional dan domestik yang baik, ada beberapa kekurangan dalam proses pembentukan yang menjadi sorotan dalam tulisan ini. Untuk menghasilkan kebijakan yang efektif, perlu dilakukan identifikasi masalah yang jelas, analisis penyebab mendasar, serta pengembangan strategi intervensi yang berdasarkan pada teori kebijakan publik serta bukti empiris yang kokoh. Tanpa landasan yang kuat, kebijakan dapat berisiko tidak berjalan efektif hingga gagal saat diterapkan.

Di samping itu, dalam pelaksanaannya, kebijakan publik sering kali mengalami berbagai masalah seperti terjadinya program yang terfragmentasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan kemampuan untuk melaksanakannya di tingkat daerah. Isu-isu ini mencerminkan adanya perbedaan antara penyusunan kebijakan di tingkat pusat dengan kondisi di lapangan, yang pada akhirnya bisa menghalangi pencapaian tujuan kebijakan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pembentukan kebijakan "Nol Kemiskinan Ekstrem 2026" dengan menggunakan sudut pandang teori kebijakan publik. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan kelemahan dalam kebijakan, namun juga untuk memberikan saran yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan di masa mendatang.

Pertanyaan Penelitian:

Bagaimana kelayakan formulasi kebijakan 'Nol Kemiskinan Ekstrem 2026' dalam perspektif teori kebijakan publik?

Tujuan Penelitian:

Mengkritisi formulasi kebijakan dengan perspektif teori kebijakan publik
Mengidentifikasi gap antara ambisi kebijakan dan feasibilitas implementasi
Memberikan rekomendasi perbaikan formulasi kebijakan ke depan

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Konsep Kemiskinan Ekstrem dalam Perspektif SDG 1

Kemiskinan ekstrem menurut Bank Dunia diartikan sebagai kondisi ketika individu hidup dengan pendapatan kurang dari USD 1,90 per hari (World Bank, 2020). Ukuran ini digunakan secara luas sebagai standar global dalam mengidentifikasi kemiskinan berbasis pendapatan. Namun demikian, pendekatan tersebut dinilai masih terbatas karena belum mampu sepenuhnya menggambarkan kompleksitas kemiskinan yang bersifat multidimensional.

Sejalan dengan perkembangan paradigma pembangunan global, SDG 1 mengadopsi pendekatan yang lebih luas dalam mendefinisikan kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, serta tingkat kerentanan sosial dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan (UNDP, 2019). Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi kemiskinan di masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan garis kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk pola konsumsi dan tingkat harga. Namun demikian, muncul pertanyaan metodologis yang penting, yaitu apakah target *"nol kemiskinan ekstrem 2026"* menggunakan definisi yang selaras dengan SDG 1 atau justru menggunakan indikator nasional yang berbeda.

Perbedaan definisi ini berpotensi memengaruhi arah kebijakan, terutama dalam hal penentuan sasaran, distribusi bantuan, serta evaluasi keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, kejelasan definisi menjadi elemen penting dalam memastikan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Teori Multiple Streams dalam Formulasi Kebijakan Publik

Kingdon (1995) dalam teorinya yang dikenal sebagai "Multiple Streams Model" menjelaskan bahwa formulasi kebijakan publik merupakan pertemuan dari tiga aliran utama: problem stream, policy stream, dan politics stream. Dalam konteks kebijakan nol kemiskinan ekstrem, perlu dianalisis apakah ketiga aliran ini telah bertemu pada waktu dan tempat yang tepat (policy window) untuk menghasilkan formulasi kebijakan yang robust.

Problem Stream:
Identifikasi dan definisi masalah kemiskinan ekstrem. Kritis untuk mengetahui: apa karakteristik demografis kelompok miskin ekstrem? Apa penyebab utama (struktural vs siklis)? Seberapa urgent masalah ini?

Policy Stream:
Solusi kebijakan yang tersedia atau dapat dirumuskan. Apakah pemerintah telah mengeksplorasi best practice dari negara lain? Apakah solusi yang ditawarkan secara teknis feasible dan terukur?

Politics Stream:
Dukungan politik dari para pemangku kepentingan (stakeholder). Apakah ada konsensus lintas partai? Apakah aktor bisnis dan masyarakat sipil terlibat dalam formulasi?

Teori Kebijakan Sosial dan Targeting

Dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem, tingkat kesalahan (*margin of error*) dalam penargetan pada dasarnya tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Namun demikian, tingkat kesalahan tersebut harus dijaga pada batas yang seminimal mungkin agar efektivitas program tetap terjamin. Secara umum, toleransi terhadap kesalahan penargetan bergantung pada kapasitas data, mekanisme verifikasi, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Dalam kajian kebijakan sosial, kesalahan eksklusi biasanya dianggap lebih serius dibandingkan kesalahan inklusi. Hal ini disebabkan karena kesalahan eksklusi menyebabkan rumah tangga miskin yang sangat membutuhkan bantuan justru tidak memperoleh akses terhadap program pemerintah. Dampaknya dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan meningkatkan kerentanan sosial. Sementara itu, kesalahan inklusi memang menimbulkan inefisiensi anggaran, tetapi dampak sosialnya dinilai relatif lebih kecil dibandingkan tidak terjangkaunya kelompok miskin ekstrem.

Beberapa studi kebijakan publik menunjukkan bahwa tingkat kesalahan penargetan di bawah 10% umumnya masih dianggap cukup baik dalam program bantuan sosial di negara berkembang, meskipun standar ideal tentu menghendaki tingkat kesalahan yang jauh lebih rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan pemutakhiran data secara berkala, memperkuat integrasi basis data sosial, serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses verifikasi penerima manfaat.

Dengan demikian, margin of error yang dapat ditoleransi sebaiknya berada pada tingkat serendah mungkin dan harus disertai upaya perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran dan kualitas sistem penargetan yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen (document analysis) dan studi literatur (literature review). Data yang dikumpulkan mencakup:

1. Dokumen kebijakan resmi terkait target nol kemiskinan ekstrem
2. Laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kondisi kemiskinan terkini
3. Jurnal ilmiah terkait formulasi kebijakan publik dan SDG implementation
4. Best practice dari negara-negara lain dalam mengatasi kemiskinan ekstrem

Analisis Data:
Dokumen dianalisis menggunakan kerangka teori Multiple Streams dan perspektif kebijakan sosial. Analisis berfokus pada: (1) identifikasi masalah dalam dokumen kebijakan; (2) kesiapan policy stream; (3) faktual di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Problem Stream*: Identifikasi Masalah yang Belum Komprehensif

Berdasarkan kajian terhadap dokumen kebijakan, pengenalan terhadap persoalan kemiskinan ekstrem dalam penyusunan kebijakan tahun 2026 masih cenderung terfokus pada aspek ekonomi,

khususnya pada indikator pendapatan di bawah garis kemiskinan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa definisi masalah yang digunakan masih sempit dan belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas kemiskinan ekstrem yang bersifat multidimensional.

Namun, dalam perspektif pembangunan modern, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai aspek non-ekonomi, antara lain:

- akses terhadap pendidikan yang berkualitas;
- kondisi kesehatan dan kecukupan nutrisi;
- ketersediaan perumahan yang layak;
- akses terhadap perlindungan sosial; dan
- partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Perspektif multidimensional ini sejalan dengan SDG 1 yang mengadopsi pendekatan *Multidimensional Poverty Index* (MPI). Dengan demikian, terdapat inkonsistensi antara komitmen global (SDGs) dan formulasi kebijakan nasional.

Selain itu, analisis penyebab akar (*root cause analysis*) dalam dokumen kebijakan masih bersifat superfisial. Tiga pertanyaan kritis belum terjawab secara jelas, yaitu: (1) apakah kemiskinan ekstrem lebih bersifat struktural, seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya, atau bersifat siklis akibat fluktuasi ekonomi; (2) sejauh mana faktor kebijakan masa lalu (*path dependency*) berkontribusi terhadap persistensi kemiskinan; dan (3) bagaimana peran kelembagaan lokal dalam mempercepat maupun menghambat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Analisis *Policy Stream*: Kelayakan Teknis dan Koordinasi Lintas Sektor

Dalam rancangan kebijakan tahun 2026, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah instrumen kebijakan, seperti program bantuan tunai bersyarat, pelatihan keterampilan, serta pemberian akses terhadap modal usaha mikro. Secara konseptual, instrumen-instrumen tersebut mencerminkan adanya upaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem melalui berbagai pendekatan intervensi.

Namun demikian, apabila ditinjau dari aspek kelayakan teknis dan implementasi, masih terdapat beberapa kelemahan mendasar yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan tersebut.

Kelemahan 1: Fragmentasi Program

Program-program seperti BPNT dan PKH masih berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi yang komprehensif. Kondisi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih penerima manfaat serta menurunkan efisiensi distribusi sumber daya. Selain itu, fragmentasi program juga menyulitkan proses pengawasan dan evaluasi kebijakan secara menyeluruh.

Kelemahan 2: Ketidakjelasan Mekanisme Koordinasi

Meskipun berbagai kementerian dan lembaga turut terlibat, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, belum terdapat kejelasan mengenai pembagian peran dan tanggung jawab antarinstansi. Ketidakjelasan tersebut mencakup penentuan sektor utama (*leading sector*), mekanisme koordinasi operasional, serta sistem insentif yang mendukung kerja sama antarlembaga.

Dalam konteks ini, teori koordinasi antarpemerintahan yang dikemukakan oleh Fritz W. Scharpf menegaskan bahwa tanpa mekanisme koordinasi formal yang jelas, koordinasi informal cenderung tidak efektif dan rentan mengalami kegagalan.

Kelemahan 3: Kapasitas Implementasi di Tingkat Lokal

Sebagian besar daerah, khususnya pada tingkat kabupaten/kota, masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur data, serta kapasitas fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi kebijakan yang menganggap seluruh daerah memiliki tingkat kesiapan yang sama tidak sepenuhnya realistis. Dengan demikian, pendekatan *one-size-fits-all* menjadi kurang relevan dalam konteks keragaman kondisi daerah di Indonesia.

Oleh karena itu, formulasi kebijakan seharusnya lebih mempertimbangkan heterogenitas kapasitas daerah agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal.

Analisis *Politics Stream*: Kolaborasi Multiaktor yang Lemah

Dari perspektif politik, komitmen pemerintah terhadap target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 terlihat cukup kuat, terutama melalui berbagai dokumen perencanaan dan pernyataan resmi di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa isu kemiskinan ekstrem telah menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Akan tetapi, apabila ditinjau lebih mendalam dari aspek partisipasi pemangku kepentingan dan dinamika politik kebijakan, masih terdapat beberapa keterbatasan yang menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap kebijakan ini belum sepenuhnya optimal.

Keterbatasan 1: Partisipasi Sektor Swasta

Peran sektor swasta, termasuk dunia usaha dan perusahaan, masih belum terlihat signifikan dalam proses perumusan kebijakan. Padahal, dalam SDG 17, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keterbatasan 2: Suara Komunitas dan Kelompok Miskin Ekstrem

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan, yaitu masyarakat miskin ekstrem, belum terlibat secara langsung dalam proses perumusan kebijakan. Keterlibatan yang ada masih bersifat konsultatif dan belum mencapai tahap *co-creation policy*. Kondisi ini berisiko menghasilkan kebijakan yang kurang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Keterbatasan 3: Dukungan Parlemen

Meskipun kebijakan ini telah masuk dalam agenda pembangunan nasional, partisipasi dan dukungan parlemen masih relatif terbatas. Rendahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) dari pihak legislatif dapat memengaruhi keberlanjutan dukungan anggaran, terutama dalam jangka menengah dan panjang.

***Gap* antara Ambisi dan Feasibilitas**

Berdasarkan analisis terhadap *problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream*, terlihat adanya kesenjangan antara ambisi kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tingkat feasibilitas implementasinya di lapangan. Target kebijakan yang tinggi belum sepenuhnya didukung oleh definisi masalah yang komprehensif, kapasitas kelembagaan yang memadai, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta dukungan politik yang inklusif dan berkelanjutan. Apabila kesenjangan tersebut tidak segera diatasi, maka terdapat risiko bahwa kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem hanya berhasil secara administratif dalam dokumen perencanaan, tetapi belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan bagi masyarakat sasaran.

Tabel 1 di bawah ini merangkum analisis gap antara target "Nol Kemiskinan Ekstrem 2026" dengan kondisi faktual:

Dimensi	Target Kebijakan	Kondisi Faktual
Definisi Masalah	Unidimensional (pendapatan)	Multidimensional (penghasilan, pendidikan, kesehatan, dll)
Kerangka Koordinasi	Lintas Kementerian	Belum terintegrasi dalam satu sistem
Kapasitas Lokal	Diasumsikan siap	Heterogen dan sebagian terbatas
Keterlibatan Stakeholder	Direncanakan	Masih minimal (bottom-up)
Target Waktu	2026	Sangat ketat (3-4 tahun)

Tabel 1: Analisis Gap Ambisi Kebijakan vs. Kondisi Faktual

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara ambisi kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Target waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar 3–4 tahun, menuntut adanya percepatan yang luar biasa dalam berbagai aspek, termasuk investasi, koordinasi lintas sektor, serta komitmen politik yang kuat.

Namun demikian, tanpa adanya perbaikan dalam formulasi kebijakan, khususnya dalam aspek definisi masalah, integrasi program, dan keterlibatan stakeholder, target tersebut berpotensi sulit untuk dicapai secara optimal.

.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dikerjakan menggunakan kerangka Multiple Streams dan pendekatan teori kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 masih dihadapkan pada berbagai kendala yang cukup signifikan.

penyusunan kebijakan belum sepenuhnya memasukkan perspektif kemiskinan yang bersifat multidimensional seperti yang terkandung dalam SDG 1. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen internasional dan pendekatan di tingkat nasional, yang masih lebih menekankan pada aspek pendapatan semata.

dari sudut pandang problem stream, analisis yang dilakukan terhadap masalah kemiskinan masih dangkal dan tidak berhasil menemukan akar masalah secara menyeluruh. Aspek struktural, kelembagaan, serta faktor sejarah kebijakan (path dependency) belum ditelaah secara mendetail, sehingga fondasi pengembangan kebijakan tersebut menjadi lemah.

dalam policy stream, meskipun ada beberapa instrumen kebijakan yang sudah dibuat, seperti program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi, masih terdapat kekurangan dalam koordinasi antarsektor, integrasi sistem informasi, serta perhatian terhadap perbedaan kapasitas di setiap daerah. Ini menunjukkan bahwa kesiapan teknis untuk kebijakan tersebut masih belum memadai.

dalam politics stream, partisipasi aktor di luar pemerintah masih tergolong sedikit. Peran sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran belum dimasukkan secara optimal dalam proses pengembangan kebijakan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepemilikan (ownership) dan legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

sasaran untuk mencapai nol kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dapat dianggap sebagai sebuah target yang sangat menantang, mengingat kompleksitas isu yang ada dan kesenjangan antara kondisi nyata dan kesiapan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan perumusan ulang kebijakan dengan pendekatan yang lebih realistis serta didasarkan pada analisis yang lebih mendalam.

Rekomendasi

Berdasarkan berbagai temuan yang ada, sejumlah langkah strategis diperlukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan nol kemiskinan ekstrem di masa mendatang.

Rekomendasi 1: Perbaikan Definisi dan Identifikasi Masalah

Pemerintah perlu mendefinisikan kembali konsep kemiskinan ekstrem dengan sepenuhnya menerapkan pendekatan multidimensional, seperti yang tercantum dalam SDG 1 dan kerangka Multidimensional Poverty Index (MPI). Selain itu, diperlukan analisis akar penyebab yang lebih mendalam dengan melibatkan beragam pihak, termasuk akademisi, peneliti mandiri, dan lembaga penelitian, untuk menentukan faktor struktural dan siklis yang mempengaruhi kemiskinan ekstrem.

Rekomendasi 2: Penataan Ulang Mekanisme Koordinasi

Perlu dibentuk mekanisme koordinasi yang lebih sistematis, contohnya melalui pembentukan tim khusus (task force) untuk menangani kemiskinan ekstrem. Struktur ini harus mencakup penetapan sektor yang memimpin dengan jelas (misalnya di bawah Bappenas atau Kantor Staf Presiden), mekanisme koordinasi yang terjadwal, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu dan pemberian insentif untuk kolaborasi antar sektor.

Rekomendasi 3: Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Partisipasi berbagai pemangku kepentingan harus ditingkatkan, termasuk sektor swasta (UMKM dan perusahaan besar), organisasi masyarakat sipil, institusi pendidikan tinggi, dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Proses pembuatan kebijakan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan partisipatif,

seperti kebijakan desain bersama dan konsultasi publik yang berulang, untuk meningkatkan legitimasi serta efektivitas kebijakan yang ditetapkan.

Rekomendasi 4: Pemetaan dan Peningkatan Kapasitas Lokal

Pemerintah perlu melakukan pemetaan kapasitas daerah secara menyeluruh, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur data, serta kapasitas keuangan. Dari hasil pemetaan tersebut, perlu disusun program peningkatan kapasitas yang sesuai dengan keadaan masing-masing daerah, tanpa menggunakan pendekatan yang seragam untuk semua daerah.

Rekomendasi 5: Penyesuaian Target Waktu dan Penetapan Milestone

Target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 sebaiknya dikaji ulang dengan cermat. Jika diperlukan, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk mengubah jangka waktu agar lebih sejalan dengan target global SDGs tahun 2030. Alternatif lainnya adalah menetapkan target sementara yang lebih realistis, seperti pengurangan bertahap dalam persentase kemiskinan ekstrem, dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat diukur dan berdasarkan data.

Rekomendasi 6: Penguatan Basis Bukti dan Penelitian

Kebijakan yang dirancang harus didasarkan pada data dan hasil penelitian yang solid. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan penelitian operasional dan evaluasi formatif terhadap program yang sudah berjalan guna menilai efektivitas dan efisiensinya. Selain itu, kerja sama dengan lembaga penelitian mandiri juga perlu ditingkatkan untuk memastikan proses pemantauan dilakukan secara objektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. BPS RI.

Coady, D., Grosh, M., & Hoddinott, J. (2004). *Targeting outcomes redux*. The World Bank Research Observer, 19(2), 303–330.

Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. John Wiley & Sons. Kingdon, J. W. (1995). *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (2nd ed.). Longman.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1989). *Implementation and Public Policy*. University Press of America.

Scharpf, F. W. (1978). *Interorganizational Policy-Making: Limits to Coordination and Central Control*. Journal of Public Policy, 1(2), 123–144.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN.

United Nations Development Programme (UNDP). (2019). *Human Development Report 2019*. UNDP.

World Bank. (2020). *Poverty and Shared Prosperity 2020*. World Bank Group.

World Bank. (2022). *Poverty and Equity Brief: Indonesia*. World Bank Group.

Alkire, S., & Foster, J. (2011). *Counting and multidimensional poverty measurement*. Journal of Public Economics, 95(7–8), 476–487.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.

Ravallion, M. (2016). *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*. Oxford University Press.

OECD. (2019). *Measuring Distance to the SDG Targets*. OECD Publishing.

Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. Longman.

Hickey, S., & Mohan, G. (2004). *Participation: From Tyranny to Transformation?* Zed Books.

Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.

Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2004). *Transformative Social Protection*. IDS Working Paper.